

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengendalian Internal

2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Dalam ISA 315 dalam Tuanakota (2013), pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasikan dan dipelihara oleh *Those Charged With Governance* (orang atau organisasi yang bertanggung jawab mengawasi arah strategis perusahaan dan kewajiban entitas yang berkenaan dengan akuntabilitasnya), manajemen, dan karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektif dan efisiennya operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Tuanakotta (2014), tujuan pengendalian internal secara garis besar dibagi kedalam 4 kelompok yaitu :

1. Strategis, sasaran-sasaran utama yang mendukung misi entitas.
2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
3. Operasi (pengendalian operasional)
4. Kepatuhan terhadap hokum dan ketentuan perundang-undangan.

2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Tuanakotta (2013: 127) pengendalian internal merupakan jawaban manajemen untuk menangkal risiko yang diketahui, atau dengan kata lain untuk mencapai suatu tujuan pengendalian. Ada hubungan langsung antara tujuan entitas dan pengendalian internal yang diimplementasikannya untuk mencapai tujuan entitas. Sekali tujuan entitas ditetapkan, manajemen dapat menentukan potensi risiko yang dapat menghambat tujuan tadi. Dengan informasi ini, manajemen dapat menyusun jawaban yang tepat, termasuk merancang pengendalian internal.

Tujuan pengendalian internal secara garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok, sebagai berikut:

1. Strategis, sasaran utama (*high-level goals*) yang mendukung misi entitas.
2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan)
3. Operasi (pengendalian operasional atau *operational controls*)
4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3 Komponen Pengendalian Internal

Menurut ISA 315 yang dikutip oleh tuanakotta (2014; 128-145), pengendalian internal terdiri dari 5 komponen, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan Pengendalian merupakan dasar bagi penelitian internal yang efektif. Lingkungan pengendalian menjadi petunjuk arah bagi entitas, membuat karyawan sadar akan pengendalian dalam organisasi serta hal tersebut memberikan kedisiplinan dan struktur bagi entitas. Lingkungan pengendalian berurusan dengan fungsi pengelolaan dan pengawasan di tingkat tertinggi dalam entitas tersebut. Selain itu juga mengatur sikap, perilaku, keasadaran berpengendalian, serta tindakan manajemen dan *Those Charged With Governance* (TCWG) mengenai pengendalian entitas.

Pengendalian dalam lingkungan pengendalian bersifat prevasif. Pengendalian tersebut tidak langsung mencegah, mendeteksi dan mengoreksi salah saji material dalam laporan keuangan. Lingkungan pengendalian internal lainnya karena semua komponen pengendalian mempengaruhi kegiatan pengendalian internal dalam komponen lain. Evaluasi auditor atas rancangan lingkungan pengendalian internal akan meliputi unsur-unsur berikut:

- a. Komunikasi dan pelaksanaan nilai integritas dan nilai lainnya.
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Keikutsertaan TCWG
- d. Gaya kepemimpinan pada umumnya
- e. Struktur organisasi
- f. Pembagian tugas dan tanggung jawab
- g. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia (SDM)

Pengendalian dalam komponen lingkungan pengendalian yang kuat dapat mengatasi kelemahan dalam komponen lain. Namun kelemahan dalam lingkungan pengendalian dapat melemahkan atau bahkan meniadakan rancangan yang baik dalam komponen pengendalian lainnya.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko dapat dilihat dari dua sisi, melalui sisi entitas dan auditor. Entitas menilai risiko dari sudut pandang ancaman terhadap pencapaian tujuan entitas, sedangkan auditor menilai risiko sebagai bagian dari proses auditnya. Jika proses penilaian risiko pada entitas yang bersangkutan (PPRE) tepat atau sesuai dengan situasi yang dihadapi, maka PPRE mendukung upaya auditor untuk menilai seberapa besarnya risiko salah saji material dalam laporan keuangan yang diauditnya.

Tuanakotta (2014) mengutip ISA 315 alinea 16 yang mengatakan jika auditor menemukan risiko salah saji yang tidak ditemukan oleh manajemen, auditor wajib mengevaluasi apakah ada jenis risiko yang diduga oleh auditor, seharusnya dapat ditemukan PPRE. Pada umumnya, PPRE terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi entitas
- b. Pejabat atau karyawan senior yang baru bergabung dengan entitas

- c. Sistem yang baru atau yang mengalami perubahan secara besar-besaran
- d. Pertumbuhan yang cepat
- e. Teknologi yang baru
- f. Model bisnis, produk, atau kegiatan baru
- g. Restrukturisasi korporasi (termasuk akuisisi dan divestasi atau pelepasan)
- h. Perluasan kegiatan di luar negeri
- i. Terbitnya pernyataan akuntansi yang baru

Jika auditor menemukan kelemahan dalam PPRE atau PPRE tidak ada atau tidak berfungsi, auditor wajib mengkomunikasikan hal tersebut kepada manajemen dan TCWG.

3. Sistem Informasi (*Information System*)

Suatu sistem informasi terdiri dari infrastruktur (komponen fisik dan perangkat keras), perangkat lunak, manusia, prosedur dan data. Sistem informasi mengidentifikasi, merekap, dan menyebarkan informasi untuk mendukung tercapainya tujuan pelaporan keuangan dan tujuan pengendalian internal.

Menurut Tuanakotta (2014), manajemen dan TCWG memerlukan informasi yang andal untuk :

- a. Mengelola entitas, seperti perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*), pemantauan kinerja (*monitoring performance*), pengalokasian sumber daya (*allocating resources*), penetapan harga (*pricing*) dan pembuatan laporan keuangan.
- b. Mencapai tujuan entitas
- c. Mengidentifikasi, menilai dan menggapai faktor risiko

Komunikasi adalah unsur kunci dalam suksesnya sistem informasi. Komunikasi yang efektif secara internal (antara manajemen dan karyawan) membantu karyawan memahami tujuan pengendalian internal, proses bisnis dan peran serta tanggung jawab masing-masing pegawai. Selain itu, komunikasi membantu karyawan dalam memahami hubungan antara kegiatan karyawan dengan kegiatan orang lain dan cara-cara melaporkan penyimpangan kepada atasan yang tepat dalam entitas.

4. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Dalam ISA 315 alinea 21 yang dikutip oleh Tuanakotta (2014), mengatakan bahwa memahami kegiatan pengendalian entitas, auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai bagaimana entitas tersebut menanggapi risiko yang timbul dari teknologi informasi. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa petunjuk dan arahan manajemen dilaksanakan. Pengendalian ini merupakan tanggapan atas risiko yang jika tidak ditanggulangi

akan mengancam tercapainya tujuan entitas. Kegiatan pengendalian dirancang untuk menanggulangi risiko yang bisa terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Proses bisnis merupakan perangkat terstruktur dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *output* tertentu. Pengendalian proses bisnis lazimnya dapat digolongkan sebagai *preventive* atau mencegah, *detective* atau menemukan dan *corrective* atau mengoreksi yang dibagi menjadi dua tergantung pada konteksnya yaitu *compensating controls* dan *steering controls*.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan merupakan komponen terakhir dalam pengendalian internal. Komponen pemantauan, menilai efektifnya kinerja pengendalian internal dengan berjalannya waktu. Tujuannya untuk memastikan bahwa pengendalian berjalan sebagaimana mestinya, dan jika tidak, maka tindakan perbaikan harus diambil. Pemantauan memberikan umpan balik kepada manajemen mengenai apakah sistem pengendalian internal yang dirancang untuk mengatasi risiko:

- a. Efektif dalam mencapai tujuan pengendalian yang ditetapkan
- b. Dilaksanakan dan dipahami dengan baik oleh karyawan
- c. Digunakan dan ditaati setiap hari
- d. Dimodifikasi atau disempurnakan sesuai dengan perubahan kondisi

Pemantauan berkala (*periodic monitoring*) berupa evaluasi terpisah dari kegiatan yang sedang berjalan. Pemantauan berkala atas proses yang kritikal

dapat dilakukan oleh pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keahlian memadai atau dengan menggunakan jasa ahli dari luar entitas yang bersangkutan. Kegiatan pemantauan juga dapat dilakukan oleh manajemen meliputi penggunaan informasi dari pihak eksternal yang mengindikasikan masalah atau yang menyoroti area yang memerlukan penyempurnaan.

2.1.4 Memahami Pengendalian Internal

Menurut ISA 315 alinea 12 (Tuanakotta, 2014), auditor wajib memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit. Meskipun kebanyakan pengendalian pada umumnya berkaitan dengan pelaporan keuangan, namun tidak semua pengendalian yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, namun tidak semua pengendalian yang berkaitan dengan pelaporan keuangan adalah relevan dengan audit.

Pada ISA 315 alinea 18 yang dikutip oleh Tuanakotta (2014), auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai sistem informasi (termasuk proses bisnis terkait) yang relevan bagi pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Jenis transaksi dalam operasi entitas yang penting dalam laporan keuangan.
2. Prosedur, dalam sistem IT maupun non IT yang digunakan untuk mengolah transaksi sejak penyiapan, pencatatan, pengolahan, pembetulan, pemindahan ke buku besar dan pelaporannya dalam laporan keuangan.

3. Catatan akuntansi, yang mendukung informasi dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang digunakan untuk menyiapkan, mencatat, mengolah dan melaporkan transaksi termasuk pembetulan yang salah dan bagaimana informasi dipindahkan ke buku besar.
4. Bagaimana sistem informasi merekam peristiwa dan keadaan (diluar transaksi) yang penting dalam laporan keuangan.
5. Proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan entitas, termasuk estimasi akuntansi dan pengungkapan yang penting.
6. Pengendalian atas *journal entries*, termasuk *non standard journal entries* yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak berulang, transaksi luar biasa, atau penyesuaian dan koreksi.

Pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal adalah pemahaman mengenai hal-hal relevan untuk melaksanakan audit. Hal ini meliputi pelaksanaan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi pengendalian yang secara langsung atau tidak langsung menanggulangi (*mitigate*) salah saji yang material. Informasi yang diperoleh, akan membantu auditor dalam menilai risiko residual (*residual risk*), risiko residual adalah risiko bawaan (*inherent risk*) dan risiko pengendalian (*control risk*), serta merancang prosedur audit selanjutnya, untuk menanggapi risiko yang dinilai.

2.1.5 Mengevaluasi Pengendalian Internal

Dalam Tuanakotta (2014) mengatakan bahwa auditor wajib mengevaluasi rancangan serta mengimplementasikan pengendalian untuk menentukan akan melaksanakan atau tidak melaksanakan uji pengendalian untuk menentukan akan melaksanakan uji pengendalian untuk mengumpulkan bukti. Evaluasi merupakan suatu proses yang terdiri dari empat langkah yaitu:

1. Langkah I: Risiko apa yang harus dimitigasi?

Mengidentifikasi risiko bawaan mengenai salah saji material (yang terdiri dari risiko bisnis dan risiko kecurangan) dan apakah risiko ini bersifat pervasif yang mempengaruhi semua asersi atau merupakan risiko spesifik yang mempengaruhi area laporan keuangan dan asersi tertentu.

2. Langkah II: Apakah pengendalian yang dirancang manajemen, memitigasi risiko itu?

Identifikasi proses bisnis apa saja yang sudah ada, dengan cara:

- a. Melakukan wawancara personalia entitas untuk mengidentifikasi pengendalian apa yang memitigasi risiko yang diidentifikasi.
- b. Meninjau kembali hasilnya, apakah benar pengendalian itu memang memitigasi risiko.

- c. Mengkomunikasikan setiap kelemahan signifikan yang diidentifikasi dalam pengendalian internal entitas kepada manajemen dan TCWG.

3. Langkah III: Apakah pengendalian yang memitigasi risiko itu, berfungsi?

Melakukan inspeksi operasi pengendalian internal yang relevan untuk memastikan bahwa pengendalian intern tersebut sudah diimplementasikan. Auditor harus memastikan apakah pengendalian internal yang relevan memang diimplementasikan.

4. Langkah IV: Apakah operasi pengendalian yang relevan, sudah didokumentasikan?

Langkah ini terdiri atas penjelasan naratif sederhana (dibuat oleh manajemen atau auditor) mengenai proses-proses utama, yang menggambarkan operasi pengendalian intern yang relevan.

2.1.6 Keterbatasan Pengendalian Internal

Tidak ada suatu sistem yang dapat mencegah secara sempurna semua penyelewengan yang ada di dalam sebuah perusahaan, karena setiap pengendalian internal perusahaan memiliki keterbatasan bawaan, (Mulyadi, 2002:181) mengemukakan keterbatasan bawaan yang melekat pada setiap pengendalian internal adalah:

Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali, manajemen dan personel lain dapat salah mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (*Collusion*). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya adalah manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk

mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

5. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

2.1.6 Uji Pengendalian (*Test of Control*)

Uji pengendalian atau *test of controls* dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai berfungsinya pengendalian. Pengendalian dapat mencegah terjadinya salah saji, mendeteksi dan mengoreksi jika salah saji sudah terjadi. Pengendalian yang dipilih untuk diuji adalah pengendalian yang bersangkutan dengan asersi yang bersangkutan

Uji pengendalian dirancang untuk memperoleh bukti mengenai:

1. Bagaimana prosedur pengendalian diterapkan sepanjang audit atau selama jangka waktu pengamatan yang relevan. Jika pengendalian yang sangat berbeda yang digunakan dari waktu ke waktu, maka setiap pengendalian harus dinilai secara terpisah.

2. Konsistensi penerapan pengendalian tersebut.
3. Oleh siapa dengan cara apa pengendalian diterapkan.

Uji pengendalian terdiri atas jenis prosedur yang berikut, Tuanakotta (2014):

1. Bertanya (*inquiries*) pada pegawai yang tepat,
2. Inspeksi atas dokumentasi yang relevan,
3. Pengamatan atas operasi entitas,
4. Pengulangan (*re-performance*) aplikasi pengendalian.

2.2 Uji Kepatuhan pada Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2002), dalam auditnya auditor tidak mengumpulkan semua bukti untuk merumuskan pendapatnya melainkan melakukan pengujian (*test*) terhadap karakteristik sebagian bukti untuk membuat kesimpulan mengenai karakteristik seluruh bukti. Dalam melakukan pengujian terhadap karakteristik sebagian bukti tersebut, auditor dapat menempuh empat cara yaitu mengambil sampel 100%, melakukan *judgement sampling*, melakukan *representative sampling*, atau melakukan *statistical sampling*.

2.2.1 Statistical Sampling

Dalam *statistical sample* auditor memilih anggota sample secara acak dari seluruh anggota populasi, dan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel secara matematis. Dengan cara ini, jika dua orang atau lebih auditor menggunakan parameter yang sama dalam pengambilan sampel dengan *statistical sampling* ini, maka semua

auditor tersebut akan menghasilkan konklusi yang tidak berbeda secara statistic. (Mulyadi, 2002)

Statistical sampling dibagi menjadi dua, yaitu *attribute sampling* dan *variable sampling*. *Attribute sampling* atau disebut juga *proportional sampling* digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam akun. Penelitian ini akan dibatasi dengan menggunakan *attribute sampling* dalam pengujian pengendalian.

2.2.1.1 Attribute Sampling Models

Terdapat tiga model *attribute sampling*, Mulyadi (2002):

1. *Fixed-sample-size attribute sampling*

Pengendalian sample dengan model ini ditujukan untuk memperkirakan presentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi.

2. *Stop-or-go sampling*

Model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil.

3. *Discovery sampling*

Model pengambilan sampel ini sangat cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah (mendekati nol)

2.2.1.1.1 *Stop-or-Go Sampling*

Stop-or-Go Sampling merupakan salah satu model attribute sampling yang digunakan untuk mengatasi pengambilan sampel yang terlalu banyak. Dalam model ini, jika auditor tidak menentukan adanya penyimpangan atau menemukan jumlah penyimpangan tertentu yang telah ditetapkan, ia dapat menghentikan pengambilan sampelnya. Prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan *stop-or-go sampling* adalah sebagai berikut : (Mulyadi, 2002)

1. Menemukan *desired upper precision limit* dan tingkat keandalan.
Pada tingkat ini auditor menentukan tingkat keandalan yang akan dipilih dan tingkat kesalahan maksimum yang masih diterima.
2. Menggunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian kepatuhan untuk menentukan sampel pertama yang harus diambil.

Jika sistem pengawasan internal klien baik, auditor disarankan untuk tidak menggunakan tingkat keandalan kurang dari 95% dan menggunakan tingkat *desired upper precision limit* lebih dari 5%. Dengan demikian pada umumnya dalam pengujian kepatuhan, auditor tidak pernah memilih besarnya sampel kurang dari 60 seperti yang terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Kepatuhan

Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Kepatuhan			
Desired Upper Precision Limit	Besarnya Sampel atas Dasar Pengujian Kepatuhan		
	90%	95%	97,50%
10%	24	30	37
9	27	34	42
8	30	38	47
7	35	43	53
6	40	50	62
5	48	60	74
4	60	75	93
3	80	100	124
2	120	150	185
1	240	300	370

3. Membuat tabel *stop-or-go decision*

Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat tabel keputusan *stop-or-go*. Umumnya dalam merancang tabel *stop-or-go decision*, auditor jarang merencanakan pengambilan sampel lebih dari 3 kali.

Jika dari pemeriksaan terhadap 60 anggota sampel tersebut auditor tidak menemukan kesalahan, maka auditor menghentikan pengambilan sampel dan mengambil kesimpulan bahwa unsur pengendalian internal yang dihentikan jika $DUPL = AUPL$ (*desired upper precision limit* sama dengan *achieved upper precision limit*). Pada tingkat kesalahan sama dengan 0, AUPL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AUPL = \frac{\text{Confidence level factor at desired reliability for occurrence observed}}{\text{Sample size}}$$

4. Mengevaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel

Pada prosedur keempat ini akan dilakukan evaluasi hasil pemeriksaan sampel dengan cara membandingkan AUPL dengan DUPL. jika dari hasil pemeriksaan pada sampel menunjukkan $AUPL \leq DUPL$, maka auditor dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal pada klien adalah efektif.

2.4 Sistem Akuntansi Pembelian

2.3.1 Definisi Sistem Pembelian

Menurut Mulyadi (2001) pengertian sistem pembelian adalah prosedur kegiatan yang digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan.

2.3.2 Dokumen yang Digunakan

Menurut Mulyadi (2001), dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah:

1. Surat permintaan pembelian

Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk

setiap permintaan, satu lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang.

2. Surat permintaan penawaran harga

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar.

3. Surat order pembelian

Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan sebagai berikut:

- a. Surat order pembelian
- b. Tembusan pengakuan oleh pemasok
- c. Tembusan bagi unit peminta barang
- d. Arsip tanggal penerimaan
- e. Arsip pemasok
- f. Tembusan fungsi penerimaan
- g. Tembusan fungsi akuntansi

4. Laporan penerimaan barang

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian.

5. Surat perubahan order pembelian

Surat perubahan order pembelian dibuat dengan jumlah lembar tembusan yang sama dan dibagikan kepada pihak yang sama dengan yang menerima surat order pembelian.

6. Bukti kas keluar

Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran.

2.3.3 Fungsi-Fungsi

Menurut Boynton (2003), pemrosesan transaksi pembelian mencakup fungsi-fungsi pembelian sebagai berikut:

1. Pengajuan pembelian

Permintaan yang diajukan oleh perusahaan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan lain, yang meliputi:

- a. Pencantuman nama pemasok pada daftar pemasok yang telah disetujui
- b. Pengajuan kembali permintaan barang dan jasa
- c. Pembuatan pesanan pembelian

2. Penerimaan barang dan jasa

Penerimaan atau pengiriman fisik barang atau jasa yang mencakup:

- a. Penerimaan barang
- b. Penyimpanan barang yang diterima untuk persediaan

c. Pengembalian barang ke pemasok

3. Pencatatan kewajiban

Pengakuan formal oleh perusahaan atas kewajiban hukum, yang meliputi:

a. Pembuatan *voucher* pembayaran dan pencatatan kewajiban

b. Pertanggungjawaban atas transaksi yang telah dicatat.

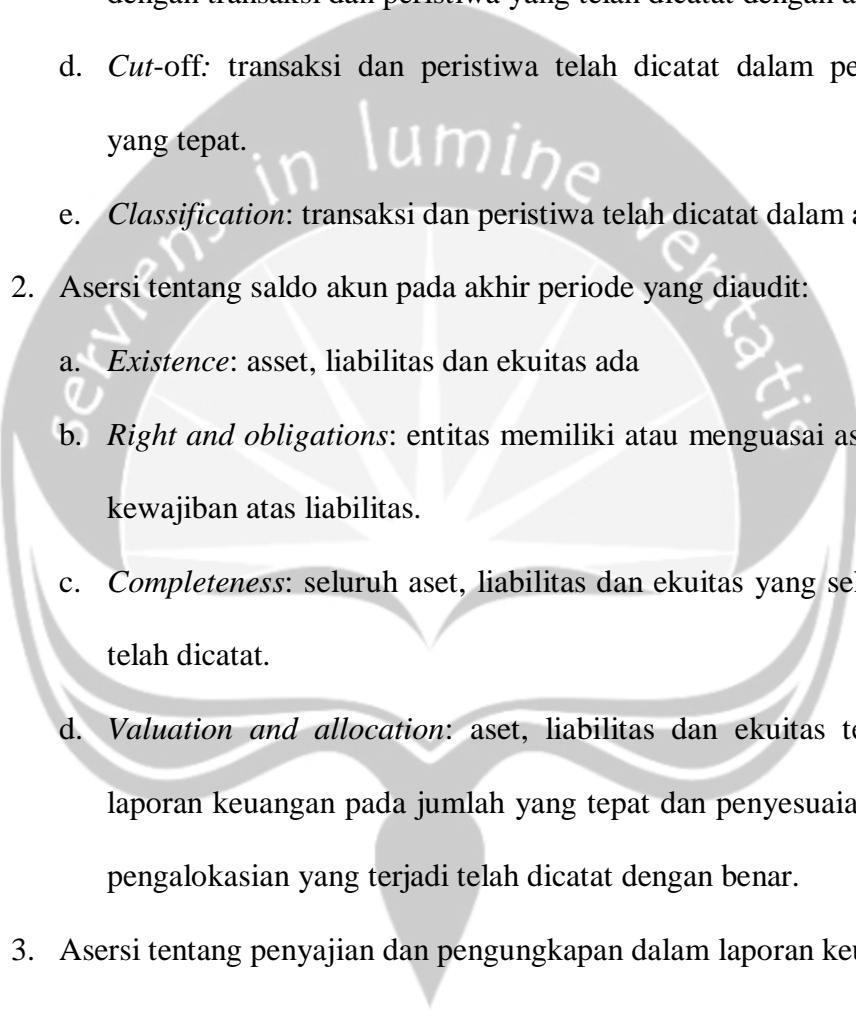
Setiap fungsi-fungsi penting itu harus diberikan kepada orang atau departemen yang berbeda. Hal ini merupakan pemisahan tugas yang klasik dengan memisahkan otorisasi atas transaksi, penyimpanan aktiva dan pencatatan transaksi. Dengan struktur semacam ini, pekerjaan seorang pegawai atau departemen dapat menyediakan pengecekan yang independen atas ketepatan pengerjaan yang dilakukan oleh orang atau departemen lainnya.

2.5 Klarifikasi Asersi

ISA 315 alinea A111 menjelaskan kelompok asersi yang dapat digunakan auditor untuk mempertimbangkan berbagai salah saji dalam laporan keuangan. Kelompok asersi untuk jenis-jenis transaksi (*classes of transaction*) dan peristiwa (*events*) untuk periode yang diaudit dijelaskan sebagai berikut: (Tuanakotta, 2014)

1. Asersi tentang jenis transaksi untuk periode yang diaudit:

a. *Occurrence*: transaksi dan peristiwa yang telah dicatat, memang terjadi dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan.

- 
- b. *Completeness*: seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat.
 - c. *Accuracy*: angka-angka, jumlah-jumlah dan data lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dicatat dengan akurat.
 - d. *Cut-off*: transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat.
 - e. *Classification*: transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang tepat.
2. Asersi tentang saldo akun pada akhir periode yang diaudit:
 - a. *Existence*: aset, liabilitas dan ekuitas ada
 - b. *Right and obligations*: entitas memiliki atau menguasai aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas.
 - c. *Completeness*: seluruh aset, liabilitas dan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat.
 - d. *Valuation and allocation*: aset, liabilitas dan ekuitas tercantum dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan penyesuaian penilaian atau pengalokasian yang terjadi telah dicatat dengan benar.
 3. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan:
 - a. *Occurrence, right and obligations*: peristiwa, transaksi dan hal-hal lainnya yang diungkapkan, telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.
 - b. *Completeness*: seluruh pengungkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan dalam laporan keuangan.

- c. *Classification and understandability*: informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapan disajikan dengan jelas.
- d. *Accuracy and valuation*: informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan dalam jumlah yang tepat.

